

**PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDRAP**

SKRIPSI

Oleh
HANIA
105730475914



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

**PENGARUH EFEKTIFITAS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDRAP**

SKRIPSI

Oleh
HANIA
105730475914



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

MOTTO

*“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar,
kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”
(Imam Syafi’i)*

*“Saat kamu merasa ingin berhenti berjuang, ingatlah
bagaimana perjuangan orangtuamu untuk membesarkanmu..”*

*“Mereka yang berhenti belajar, akan menjadi pemilik Masa Lalu.
Dan mereka yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik Masa Depan.”*

*“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan
telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras,
keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan.” (Chairul Tanjung)*

...Man Jadda Wa Jada...

PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini dengan tulus kupersembahkan untuk Mama
dan Ayahku tercinta, yang telah mengurai cinta kasih
yang tak bertepi melalui lantunan do’a untuk keselamatan,
yang mencintai dan menyayangiku sepenuh hati,
yang dengannya kebahagiaanku takkan pernah pudar,
yang dengan keringat letihnya membesarkanku tanpa keluhan,
sehingga menjadi motivasi bagiku untuk meraih kesuksesan,
serta sebagai tanda hormat dan baktiku atas segala pengorbanan
yang telah diberikan untukku selama ini.*

Uhibbukunna fillah, Mama, Ayah.....

*Dan juga sebagai wujud terima kasihku kepada
seluruh Keluargaku, Sahabat-sahabatku, serta Almamaterku....*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap"
Nama Mahasiswa : Hania
No. Stambuk/NIM : 105730475914
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di gedung Iqra lantai 7 ruangan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis pukul 09.00 – 12.00 WITA

Makassar, 03 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Ikram Idrus, M.Si.
NBM: 787256



Saida Said, S.E., M.Ak.
NBM: 1151806

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Saya yang beranda terapan di bawah ini telah menerima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,M.M

(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR., S.E.,M.M.

(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR., S.E.,M.M.

2.Linda Arisanti Razak, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

3. Muttiarni, S.E., M.Si

4. Muh. Nur, S.E.,M.M

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E.,M.M.

NBM. 903 078

FAKULTAS EKONOMI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hania

Stambuk : 105730475914

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018


Yang membuat Pernyataan,

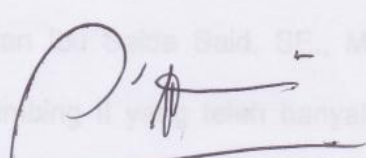


Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ketua,
Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078


Ismail Badollahi, S.E.M.Si,Ak,CA,CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca.CSP selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Ikram Idrus, M. dan Ibu Saida Said, SE., M. Ak selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kedua orang tuaku,serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
7. Pimpinan serta pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan seperjuangan prodi Akuntansi angkatan 2014 khususnya kelas AK.4-14, Hartina musfira, Rini, Jumrawati, Windasari, Jumianti, jumariah dan yang lainnya yang telah menjadi teman terbaik selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, semoga keakraban dan kebersamaan kita tidak berakhir sampai disini.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
10. *And the last, someone who will be the first and the last of my love inshaa Allah, hope Allah will meet us in the best place, in the our future. Thanks for everything.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Rida dari-Nya. Amin.

Makassar, 2018

Penulis

ABSTRAK

HANIA, Tahun 2018 Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sidrap. Dibimbing Oleh H. Ikram Idrus dan Saida Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada bagian akuntansi atau keuangan yang terdiri dari 30 orang dari 3 Bidang, yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap. Adapun jumlah sampel yaitu sebanyak 30 orang, karena penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Kuesioner diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji (t) dapat diketahui nilai t-hitung > t-tabel sebesar 3,185 dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meninjau Korelasi (r) antara Standar Akuntansi Pemerintahan (X) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah sebesar 0,516 yang berarti hubungan antara X dan Y adalah sedang. Sedangkan analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 26,6% sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Efektivitas, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

HANIA, 2018 Influence the effectiveness of the application of accounting standards to the quality of the financial report of the Government of the Regency Srikalahasthi. Mentored by h. Ikram Idrus and Saida Said.

This research aims to know the extent of the influence the effectiveness of the application of accounting standards to the quality of the financial report of the Government of the Regency Srikalahasthi.

This research uses descriptive quantitative methods. Data obtained from the primary data through the dissemination of the questionnaire. The population in this study i.e., a clerk in the accounting or finance which consists of 30 people from 3 Field, who worked in the Financial Management area (BPKD) District Srikalahasthi. As for the number of samples that is as many as 30 people, because this research uses techniques of sampling is saturated. The questionnaires were processed using the SPSS version application 22.

Based on the results of testing the hypothesis test (t) can be found on the t-value calculate $>$ t-table of 3.185 and value the significance of 0.004 0.05 so that $<$ concluded that the effectiveness of the application of accounting standards of governance effect of positive and significantly to the quality of the financial report of the Government of the region. review the Correlation (r) between Governmental accounting standards (X) to the quality of the financial report (Y) is 0.516 which means the relationship between X and Y is the medium. Whereas the determination of the coefficient analysis note that the influence of the application of government accounting standards to the quality of local government financial reports amounted to 26.6% 73.4% while the rest is affected by other variables not examined in the This research.

Key Words: Effectiveness, Government Accounting Standards, The Quality Of Financial Reporting.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	8
A. Akuntansi Pemerintah.....	8
B. Standar Akuntansi Pemerintah.....	10
C. Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	12
D. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	12
E. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	16
F. Laporan Keuangan	17

G. Tujuan Laporan Keuangan	18
H. Komponenn Laporan Keuangan.....	19
I. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan	21
J. Kendala Informasi yang Relavan dan Andal	22
K. Penelitian Terdahulu	23
L. Kerangka Pikir.....	25
M. Hipotesis	26
BAB IIIMETODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	29
F. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
B. Deskriptif Data Atas Variabel Penelitian.....	39
C. Hasil Penelitian	46
D. Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	20
4.1 Distribusi pengembalian kuesioner	40
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	41
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	42
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	45
4.6 Deskripsi Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) .	47
4.7 Deskripsi Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	49
4.8 Uji Validitas	52
4.9 Uji Reabilitas	54
4.10 Uji Determinasi (r^2).....	55
4.11 Uji t	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi	35
4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	41
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	42
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	45
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda antar masing-masing daerah sehingga membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Selain itu, di era globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pada setiap pemerintah daerahnya.

Daya saing pada pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat tercapai melalui otonomi daerah dengan peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih. Sehingga, dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan berada pada pemerintah daerah. Menghadapi kondisi yang demikian pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil maka hal itu Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim et al, 2012).

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun komponen yang disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Laporan keuangan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Tanjung, 2008). Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat (Disclaimer). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010.

Terlihat dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012-2016 atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama 4 tahun berturut-turut. Alasan memberikan opini tersebut dikarenakan terdapat kelemahan pada pengendalian intern serta kelemahan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun pada Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Sidrap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini pencapaian yang baik untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap kedepan. Berikut data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Sidrap dari tahun 2012-2016 yang disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

LKPD (Tahun)	Opini
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP

Sumber: LHP LKPD Kabupaten sidrap TA.2016

Dalam tabel 1.1 yang menyajikan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Sidrap dari TA 2012 sampai dengan TA 2016 terlihat bahwa BPK telah memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun tersebut.

Menurut informasi dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap baru pertama kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya aset tetap yang tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir yang belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), penatausahaan persediaan yang tidak memadai, serta pelaksanaan belanja modal dan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menggambarkan adanya kesalahan atau kurang efektifnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang seharusnya menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan laporan

keuangan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparaturnya atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlaila (2014), Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini memilih Kabupaten Sidrap karena merupakan Provinsi dan dari pencarian peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan pada objek tersebut.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Rachmat (2010:25) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang di dalamnya memuat segala pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan,

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap” untuk menguji apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah efektif atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Apakah efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Sidrap.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dapat memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan efektif dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat mendorong masyarakat untuk memberikan partisipasi, kontrol, dan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2009: 1), akuntansi pemerintahan (governmental accounting) banyak menyatakan teminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Nordiawan et.al (2007: 4), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku. Dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan yang telah disajikan, akuntansi pemerintahan berkembang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

Tidak ada pengungkapan laba, Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran

pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.

Tidak ada pengungkapan kepemilikan, Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

Penggunaan akuntansi dana, Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo laba.

Sedangkan tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan ada tiga macam, yaitu: Pertanggungjawaban, Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan.

Manajerial, Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

Pengawasan, Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

B. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mahmudi (2011: 271), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan:

- 1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan;
- 2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya;
- 3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan;
- 4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan
- 5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011: 271).

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Nordiawan et al, 2009: 123). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

C. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nurlaila (2014: 31) menyatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Suatu sistem dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari

penjelasan diatas dapat didimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut adalah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua

SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal diterapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual.

Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua adalah sebagai berikut:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan PSAP ini yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Tujuan PSAP ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Tujuan PSAP ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan PSAP ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan dari catatan atas laporan keuangan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Tujuan PSAP ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. pernyataan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum dan kepada seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran, dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dan juga memberikan panduan untuk identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, dan penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban yang meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

Tujuan PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Pernyataan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum yang berada di bawah pemerintah pusat maupun daerah.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan PSAP ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksud.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

PSAP ini bertujuan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini berlaku untuk setiap pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

E. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan”(Halim, 2012).

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda (external), seperti DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan

berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

F. Laporan Keuangan

Menurut Permadi (2013: 49) menyatakan laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Adapun definisi lain dari laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 7).

G. Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2011:276) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Sedangkan pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: indikasi

apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

H. Komponen Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat tujuh laporan keuangan pokok, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c) Neraca,

merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d) Laporan Operasional (LO),

menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e) Laporan Arus Kas (LAK),

menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

f) Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

I. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengorekso hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah: (1) memiliki manfaat umpan balik (feedback value); (2) memiliki manfaat prediktif (predictive value); (3) tepat waktu; dan (4) lengkap.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi

yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: (1) penyajian jujur; (2) dapat diverifikasi (verifiability); dan (3) netralitas.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

J. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan (PP No. 71 tahun 2010). Tiga hal yang menimbulkan kendala

dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) materialitas; (2) pertimbangan biaya dan manfaat; dan (3) keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

K. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yang disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil
1	Pravitasari Eka Ningtyas (2015)	Pengaruh efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kuantitatif.	Penerapan standar akuntansi pemerintahan pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sudoarjo sudah sangat efektif, dan kualitas laporan keuangannya pun sudah sangat berkualitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 20.
2	Ni Luh Nyoman Ari Uiyanti (2014)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf	Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka.	Semakin tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten

		akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pabupaten Buleleng		buleleng.
3	P. Ayu Ratna Dewi (2014)	Pengaruh efektifitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) pada kualitas laporan keuangan	Menggunakan teknik analisis Kuantitatif, yaitu analisis data dengan melakukan prosedur perhitungan tertentu sehubungan dengan penilaian terhadap efektifitas penerapan SIPKD	Tingkat efektifitas penerapan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dipemerintah Kota Denpasar.
4	Moh. Mashudi Arif (2014)	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kabupaten Bondowoso	Penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Data yang diperoleh berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAPakrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010.
5	Wayan Karsana (2017)	Pengaruh Efektifitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli	Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang berbentuk Asosiatif dengan tipe Kausalitas.	Efektifitas penerapan SAP, kompetensi sumber daya, dan Sistem pengendalian intern terbukti berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

6	Drs. Anwar Made, M.Si., Ak CA (2016)	Anallisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010	Penelitian ini menggunakan Kualitatif Interpretif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman objek peneliti terhadap SAP berbasis AkruaI melalui wawancara dan data yang dikumpulkan.	Penyajian laporan keuangan Berbasis AkruaI di Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondoakan dilaksanakan penuh pada tahun anggaran 2016.
---	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L. Kerangka Pikir

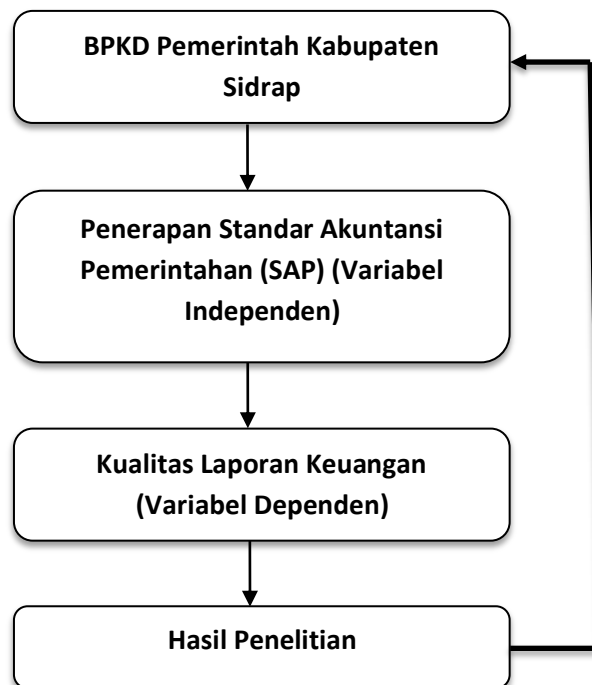
Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Ketiga indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisisioner.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Keempat indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisisioner.

Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam

rangka transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yaitu mengenai pengaruh peran Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan secara stematik adalah sebagai berikut gambar 2.1



M. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kuantitatif yang meliputi analisa Deskriptif. Analisa deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menjelaskan angka-angka dari hasil pengelolaan data.

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pegawai BPKD yang dijadikan sebagai Responden, dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literature-literatur. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2014:16).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah di Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) yang berlokasi di Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan. Mulai bulan April-Mei 2018.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pada bagian akuntansi atau keuangan yang terdiri dari 30 orang dari 3 Bidang, yang bekerja pada

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel karena semua anggota populasi digunakan sebagai sample karena jumlah populasi kurang dari 100 orang. Adapun jumlah sampel yaitu sebanyak 30 orang, hal ini dikarenakan judul penelitian ini mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang tentunya digunakan oleh bagian keuangan atau akuntansi di BPKD Kabupaten Sidrap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan primer dan Sekunder: data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui pihak perantara. Adapun teknik yang digunakan adalah kuisisioner (angket). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet (Sugiyono, 2012: 192). Pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda pada jawaban yang telah disediakan. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dan terstruktur, yang artinya jawaban pada setiap pertanyaan yang disediakan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban selain jawaban-jawaban yang disediakan. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen dan literature-literatur.

E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel Independen

Standar akuntansi pemerintahan(SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan (Afifah, 2009: 27). Ketiga indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisioner.

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel atau indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010). Keempat indikator tersebut masing-masing dijadikan pedoman kedalam item-item pertanyaan pada kuisioner.

Pengukuran indikator-indikator variabel menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawab-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima.

F. Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam memperoleh data ini Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Analisis Data

a) Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan jumlah skor totalnya. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Momen. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,3$. Jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2011: 183).

b) Uji Reliabilitas

Sugiyono (2011: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek

yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2010:64).

2. Analisis Regresi Sederhana

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menggunakan analisis regresi sederhana bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Dimana :

- Y : Kualitas Laporan Keuangan
- X : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- α : Konstan
- β : Koefisien regresi
- e : Standar eror atau nilai residu

Sementara itu, langkah-langkah untuk mengujipengaruh variable independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan:

a) Uji r²

Uji Koefisien Determinasi (R) adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien

ini menunjukkan persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Wijaya, 2012:104).

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b) Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < 0.05$ maka ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. > 0.05$ maka tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

1. Sejarah Organisasi

Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidrap terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berubah struktur dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) Unit Satuan Kerja Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang membawahi 1 Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian, dan 8 Sub Bidang. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Pemangku Jabatan Eselon II b) yang selain

sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaksana fungsi Bendahara Umum Daerah.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unit organisasi pemerintah daerah pelaksana fungsi staf yang bertugas merumuskan kebijakan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, melaksanakan perbendaharaan, dan melaksanakan Akuntansi Pemerintah Daerah :

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka secara struktural susunan organisasi Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, pada gambar 4.1 :

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana struktur organisasi pada gambar 4.1 tersebut, dijelaskan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Adapun Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu :

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap :
 - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis serta rencana Anggaran Satuan Kerja Badan
 - b. Menyelenggarakan administrasi umum

- c. Membina dan mengkoordinasikan Sekretariat dan bidang-bidang dilingkup Badan
- d. Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan Instansi terkait
- e. Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Pengelola Keuangan Daaerah
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan membuat laporan secara berkala.

(2) Sekretaris :

- a. Mengkaji dan merumuskan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Sekretariat
- b. Menghimpun dan mengkompilasi rencana strategis dan anggaran satuan kerja dari setiap bidang dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat dan membuat laporan secara berkala.

(3) Bidang Anggaran :

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran bidang
- b. Mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah

- c. Membina dan mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang di Lingkup Bidang Anggaran
- d. Menyelenggarakan administrasi umum
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem anggaran daerah
- f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala.

(4) Bidang Perbendaharaan :

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang
- b. Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c. Membina dan mengkoordinasikan sub bidang lingkup Bidang Perbendaharaan
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memberikan pelayanan administrasi perbendaharaan
- e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala.

(5) Bidang Pengelolaan Asset :

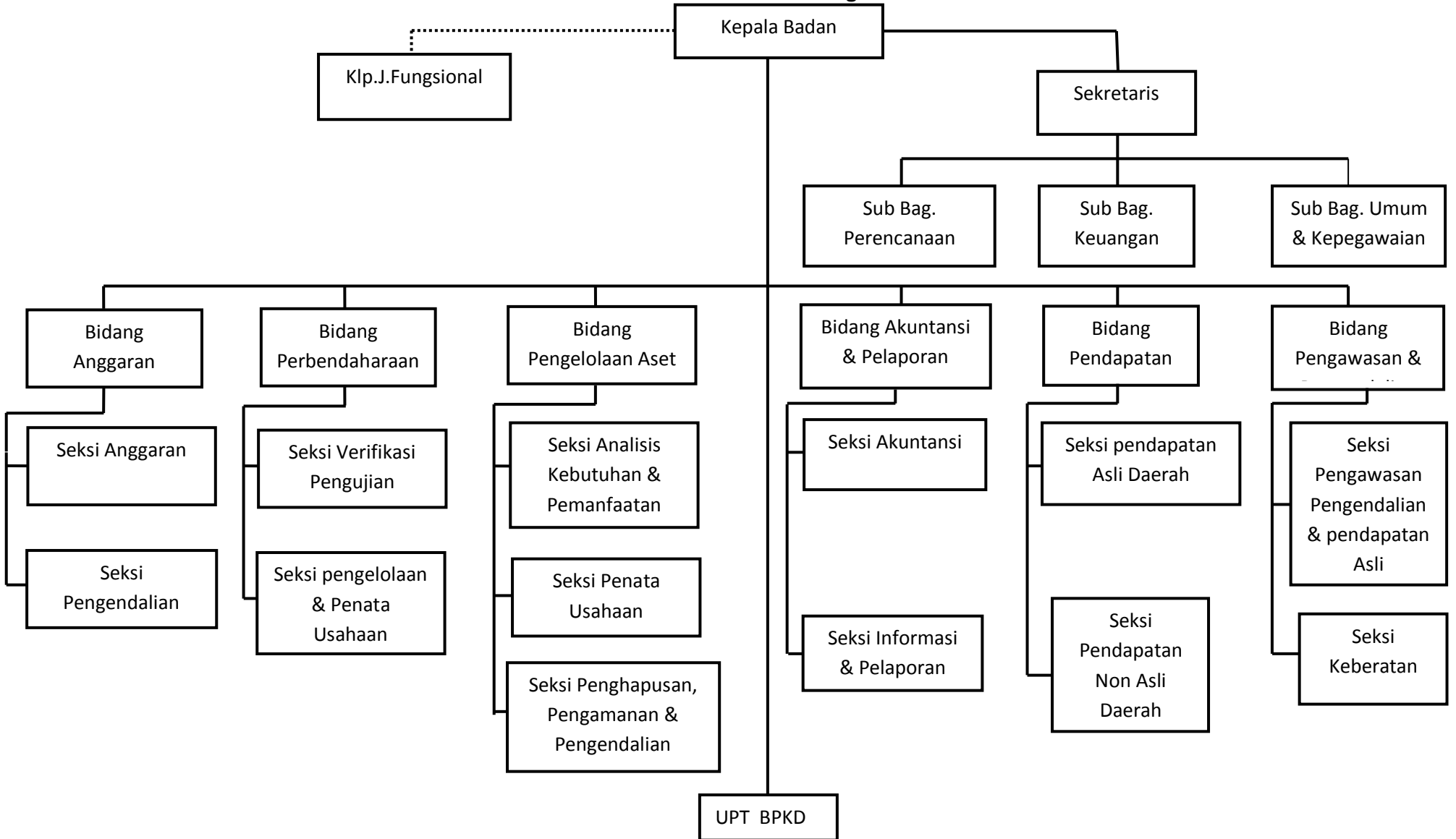
- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang
- b. Mengkoordinasikan dengan Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c. Membina dan mengkoordinasikan sub bidang lingkup Bidang Pengelolaan Asset

- d. Menyelenggarakan administrasi umum
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan manajemen pengelolaan asset daerah serta membuat laporan secara berkala.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

- a. Menyusun rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan
- b. Merumuskan kebijakan teknis Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah
- c. Melaksanakan dan Membina Akuntansi Keuangan Daerah
- d. Melaksanakan dan Membina penyusunan Laporan Keuangan Daerah
- e. Melaksanakan evaluasi realisasi keuangan daerah
- f. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Terwujudnya Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional.

b. Misi

- a) Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah
- b) Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Anggaran Daerah
- c) Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan dan Memberikan Pelayanan Administrasi Perbendaharaan
- d) Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pelaporan dan Akuntansi Keuangan dan Asset Daerah
- e) Menyelenggarakan Pengendalian Anggaran Agar Lebih Berorientasi Efisiensi dan Efektifitas
- f) Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Aman dan Sehat.

B. Deskriptif Data Atas Variabel Penelitian

1. Karakteristik Pengambilan Data dan Olah Kuesioner

Dalam penelitian ini data yang diperlukan didapat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 3 Bidang, yaitu Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Asset, dan Bidang Anggaran di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap. Jumlah kuisioner yang disebar adalah sebanyak 35 kuisioner, yang kembali dan dapat

dianalisis sebanyak 30 kuesioner (86%). Lebih jelasnya mengenai data penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini :

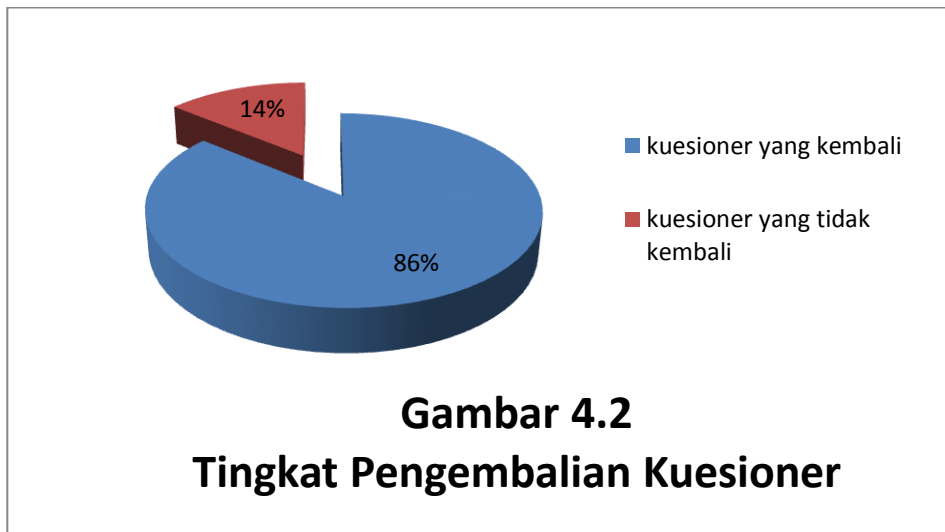
Tabel 4.1

Distribusi pengembalian kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang kembali	30	86%
2	Kuesioner yang tidak kembali	5	14%
Total kuesioner		35	100%

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

jumlah populasi sebanyak 35 responden di, Badan Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari karyawan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Asset, dan Bidang Anggaran. Penelitian ini telah secara langsung memberikan kuesioner kepada 35 responden, tetapi peneliti hanya memperoleh kembali kuesioner sebanyak 30 kuesioner yaitu sebanyak 86% sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 orang atau sebesar 14%. Adapun dari 5 kuesioner yang tidak kembali disebabkan 2 diantaranya tidak berada ditempat saat pengumpulan kuesioner sedangkan 3 orang lainnya sedang melakukan perjalanan dinas. Dari tabel distribusi kuesioner sebelumnya akan nampak pada gambar 4.2 :



Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

Jumlah pernyataan dalam kuesioner tersebut yaitu sebanyak 20 item. Pernyataan untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari 10 pernyataan dan pada variabel kualitas laporan keuangan sebanyak 10 pernyataan. Berikut ini beberapa pernyataan yang dibagikan peneliti kepada responden.

2. Karakteristik Responden

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

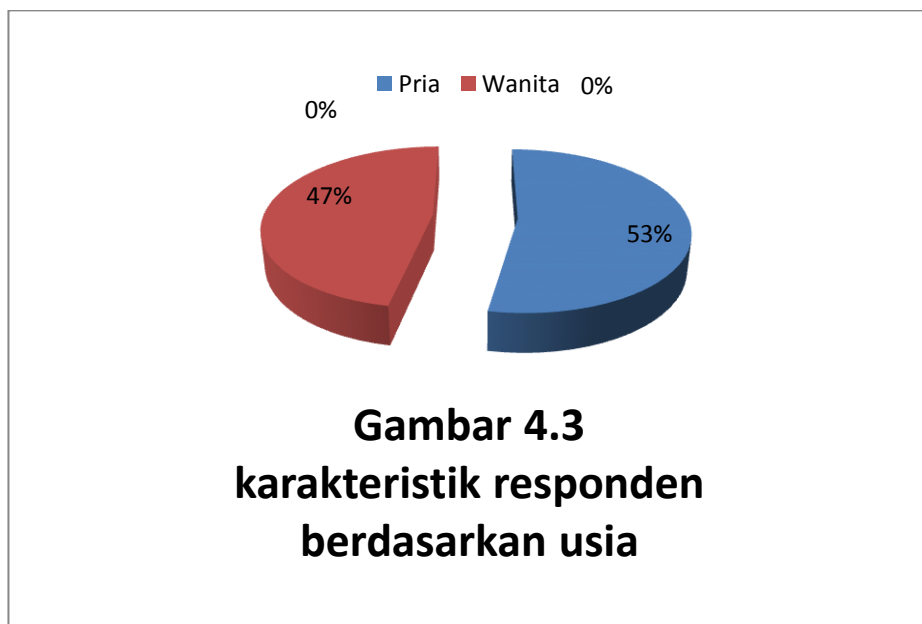
Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
Pria	16	53%
Wanita	14	47%
Total	30	100%

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria yang berjumlah 16 orang atau sebesar 53% dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 14 orang atau sebesar 47% dari total responden di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap. Dari tabel sebelumnya dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.3
karakteristik responden
berdasarkan usia

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 4.3

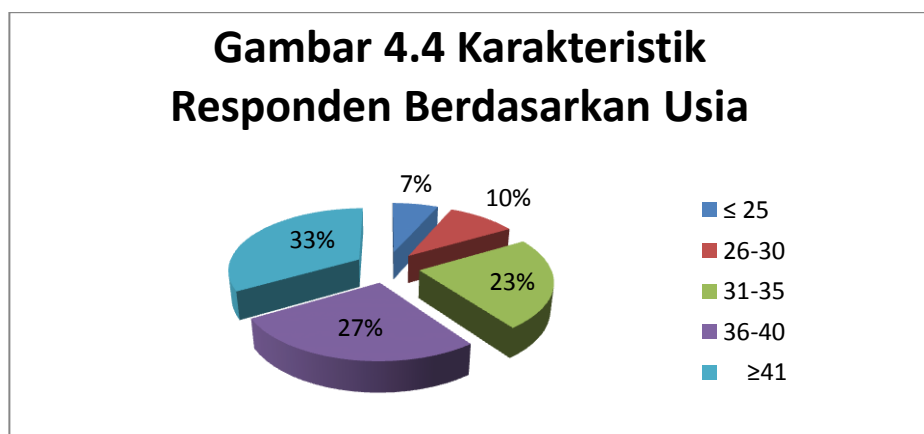
Distribus Responden Berdasarkan Usia

Usia(Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 25	2	7%

26-30	3	10%
31-35	7	23%
36-40	8	27%
≥41	10	33%
TOTAL	30	100%

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa responden yang berusia ≤ 25 tahun berjumlah 2 atau sebanyak 7%, sedangkan responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 3 orang atau sebanyak 10%, usia 31-35 tahun sebanyak 7 orang atau 23%, usia 36-40 tahun sebanyak 8 orang atau 27% dan responden yang berusia ≥ 41 tahun sebanyak 10 orang atau 33%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun yang merupakan Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap. Dari tabel sebelumnya dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

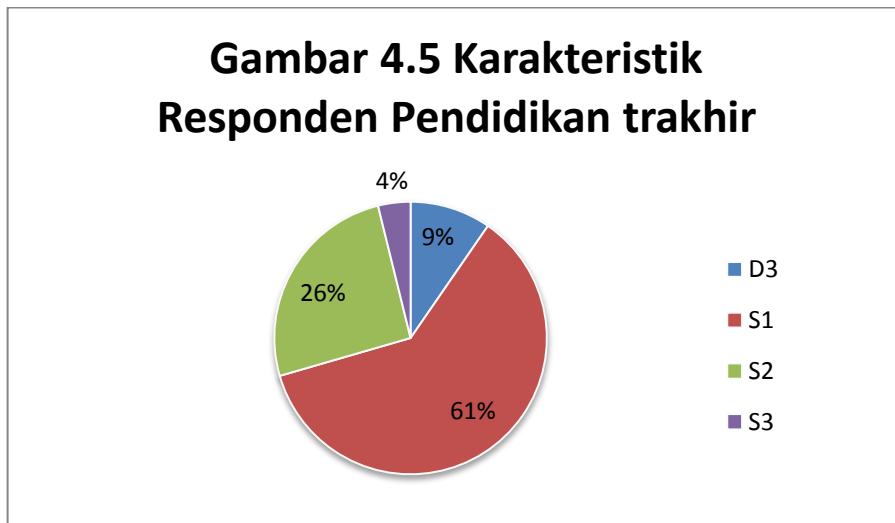
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase (%)
D3	3	10%
S1	19	63%
S2	8	27%
S3	0	0%
TOTAL	30	100%

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau 10%, S1 sebanyak 29 orang atau 63%, S2 sebanyak 8 orang atau 27%, dan tidak adanya responden dengan pendidikan terakhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap adalah S1 dan dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.5 Karakteristik Responden Pendidikan trakhir



Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

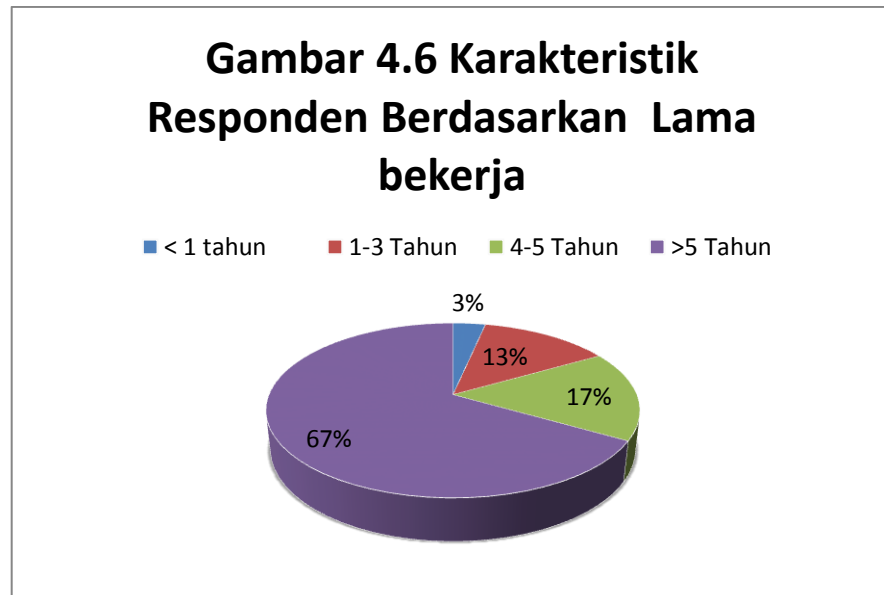
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 1 tahun	1	3%
1-3 Tahun	4	13%
4-5 Tahun	5	17%
>5 Tahun	20	67%
TOTAL	30	100%

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa responden dengan lama bekerja <1 tahun berjumlah 1 orang atau sebanyak 3%, responden dengan lama bekerja 1-3 tahun sebanyak 4 orang atau 13%, responden dengan lama bekerja 4-5 tahun sebanyak 5 orang atau 17%, dan responden dengan lama bekerja >5 tahun sebanyak 20

orang atau 67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja diatas 5 tahun, uraian tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

C. Hasil penelitian

1. Analisis Deskriptif Kualitatif Variabel Penelitian

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat positif, dimana pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat bahwa sangat pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Deskripsi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X)

Deskripsi	Mean	Median	Std deviation	Min	Max	Variance	Sum
1	4.7000	4	0,702	2	5	0,493	141
2	4.8333	4	0,461	3	5	0,213	145
3	4.7000	4	0,651	2	5	0.424	141
4	4.6333	4	0,668	2	5	0,447	139
5	4.8000	4	0,406	4	5	0,166	144
6	4.2333	4	0,678	3	5	0,461	127
7	4.1000	4	0,607	3	5	0,369	123
8	4.2000	4	0,714	3	5	0,510	126
9	4.1667	4	0,698	3	5	0,489	125
10	4.2667	4	0,739	3	5	0,547	128

Dari table sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penerapan basis akrual untuk pengakuan asset dalam Neraca Laporan keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan sum 141 dengan mean 4,7000, standar deviation 0,702 dan variance 0,493
- 2) Penerapan basis akrual untuk pengakuan kewajiban dalam Neraca Laporan Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 145 dengan mean 4.8333, standar deviation 0,461 dan variance 0,213.
- 3) Penerapan basis akrual untuk pengakuan ekuitas dalam Neraca Laporan Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan sum 141 dengan mean 4.7000, standar deviation 0,651 dan variance 0.424.

- 4) Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam Lapran Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 2 dan sum 139 dengan mean 4.6333, standar deviation 0,668 dan variance 0.447.
- 5) Penerapan basis kas untuk pengakuan belanja dalam laporan realisasi anggaran pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 4 dan sum 144 dengan mean 4,8000 standar deviation 0,406 dan variance 0.166.
- 6) Penerapan basis kas untuk pengakuan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 127 dengan mean 4.2333, standar deviation 0,678 dan variance 0.461.
- 7) Asset dicatat sesuai dengan nilai wajar dalam Laporan Keuangan pada BPKD . Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 123 dengan mean 4.1000, standar deviation 0,607 dan variance 0.369.
- 8) Menyajikan dengan wajar transaksi yang seharusnya disajikan, maka transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 126 dengan mean 4.2000, standar deviation 0,714 dan variance 0.510.
- 9) Menyajikan dengan wajar peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi, dan bukan hanya

aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 125 dengan mean 4.1667, standar deviation 0,698 dan variance 0.489.

10) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan pada BPKD. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 128 dengan mean 4.2667, standar deviation 0,739 dan variance 0.547.

b. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel kualitas laporan keuangan dalam penelitian berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat positif, dimana pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting. Dalam penelitian ini diperoleh data untuk variabel kualitas laporan keuangan sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Deskripsi variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Deskripsi	Mean	Median	Std deviation	Min	Max	Variance	Sum
1	4.1667	4	0,698	3	5	0,489	125
2	4.1667	4	0,647	3	5	0,420	125
3	4.3333	4	0,660	3	5	0,437	130
4	4.2000	4	0,714	3	5	0,510	126
5	4.3333	4	0,606	3	5	0,368	130
6	4.4333	4	0,568	3	5	0,323	133
7	4.2000	4	0,714	3	5	0,510	126

8	4.2667	4	0,639	3	5	0,409	128
9	4.3000	4	0,595	3	5	0,355	129
10	4.1667	4	0,698	3	5	0,489	125

Dari tabel di sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Laporan keuangan mengandung Informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka ddimasa lalu. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 125 dengan mean 4,1667 standar deviation 0,698 dan variance 0,489.
- 2) Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 125 dengan mean 4,1667, standar deviation 0,647 dan variance 0,420.
- 3) Laporan keuangan menyajikan informasi yang tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 130 dengan mean 4,3333 standar deviation 0,660 dan variance 0,437.
- 4) Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 126 dengan mean 4,2000 standar deviation 0,714 dan variance 0,510.

- 5) Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 130 dengan mean 4,3333 standar deviation 0,606 dan variance 0,368.
- 6) Laporan Keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 133 dengan mean 4,4333 standar deviation 0,568 dan variance 0,323.
- 7) Laporan Keuangan dapat diverifikasi. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 126 dengan mean 4,2000 standar deviation 0,714 dan variance 0,510.
- 8) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 128 dengan mean 4,2667 standar deviation 0,639 dan variance 0,409.
- 9) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 129 dengan mean 4,3000 standar deviation 0,595 dan variance 0,355.
- 10) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna

atau pihak yang berkepentingan. Jawaban dari responden maksimal 5 minimal 3 dan sum 125 dengan mean 4,1667 standar deviation 0,698 dan variance 0,489.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrument, dimana nilai validitas dapat dilihat pada kolom *CorecctedItem-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang didapat lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrument tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini angka kritik adalah $N-2 = 30-2=28$ dengan tarif signifikan 5% dengan menggunakan pengujian satu arah, maka angka kritik untuk uji validitas dalam penelitian ini adalah 0.306. Dengan demikian maka berdasarkan pengujian validitas instrument, nilai *Coreccted Item-Total Correlation* bernilai positif dan diatas nila r_{tabel} 0.306 yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat di uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

Uji Validitas

Instrument Variabel	Question	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	1	0,531	0.306	Valid
	2	0,813	0.306	Valid
	3	0,571	0.306	Valid
	4	0,580	0.306	Valid
	5	0,,439	0.306	Valid

	6	0,574	0.306	Valid
	7	0,568	0.306	Valid
	8	0,635	0.306	Valid
	9	0,496	0.306	Valid
	10	0,637	0.306	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1	0,505	0.306	Valid
	2	0,498	0.306	Valid
	3	0,588	0.306	Valid
	4	0,492	0.306	Valid
	5	0,478	0.306	Valid
	6	0,404	0.306	Valid
	7	0,519	0.306	Valid
	8	0,7734	0.306	Valid
	9	0,683	0.306	Valid
	10	0,477	0.306	Valid

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

b. Uji Realibilitas

Satu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 22. Hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* (a) item untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,6 sehingga item untuk setiap variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.9

Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>cronbach's alpa</i>	Batas reliabilitas	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X)	0,857	0,6	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,841	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti

c. Uji Hipotesis

1. Uji R²

Analisis determinasi adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi RSquare untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji, koefisien determinasi RSquare menunjukkan hanya sebesar 0,266 atau 26,6% pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sidrap sedangkan 73,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.11

**Uji Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.516 _a	.266	.240	3.66846	.266	10.147	.004	1.435

a. Predictors: (Constant), penerapan standar akuntansi pemerintahan

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

2. Uji t

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < 0.05$ maka ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. > 0.05$ maka tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12

**Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.759	7.191		2.748	.010
	penerapan standar akuntansi pemerintahan	.511	.160	.516	3.185	.004

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 4.12, maka dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 19,759 + 0,511X + 0,160$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 19,759 artinya jika Standar Akuntansi Pemerintahan (X) nilainya adalah 0 maka Kualitas Laporan Keuangan sebesar 19,759.
- b. Koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,511 dengan nilai signifikan $0,004 < 0,05$ artinya Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini berarti bahwa, semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka Kualitas Laporan Keuangan semakin meningkat, atau dapat diartikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan meningkat sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 1%.
- c. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap (Y) tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan (uji t) yang telah dilakukan terkait pengaruh efektifitas penerapan standar pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan nilai 3,185 dan nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel efektifitas penerapan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan analisis koefisien determinasi (R^2) Pengaruh efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 26,6% dan sisanya sebesar 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan standar akuntansi pemerintahan semakin baik maka semakin berkualitas juga laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan memerlukan peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pravitasari Eka Ningtyas(2015) juga menyimpulkan bahwa variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Sidrap sudah sangat efektif, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap pun sudah sangat berkualitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS versi 22. Subjek penelitian ini adalah 3 Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) yaitu Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran dan Bidang Pengelolaan Asset. Dari total kuisisioner yang disebar yakni sebanyak 35 kuisisioner, hanya 30 kuisisioner yang kembali dan dapat diolah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui nilai-t hitung > t-tabel dengan nilai 3,185 dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan analisis koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 26,6% sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang ada, adapun saran yang dapat disampaikan antara lain:

- (1) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya BPKD di Kabupaten Sidrap lebih memperhatikan penerapan standar akuntansi pemerintahan sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan;
- (3) untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada standar akuntansi pemerintahan namun juga dapat menambah variabel independen lain yang mungkin memiliki pengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- (4) selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada beberapa bidang seperti halnya pada penelitian ini yang hanya terfokus pada 3 Bidang BPKD di Kabupaten Sidrap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.N. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Arif, M.2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Azlim, Darwanis, dan U.A. Bakar. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi* vol 1: 1-14.
- Dewi, R. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,8.3(2014)
- Ghozali, I. 2010. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. penerbit UNDIP. Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.
- Karsana, W. 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.10 Oktober (2017): 643:670.
- Made, A. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. *Journal Riset Mahasiswa*.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ningtyas, P.E., dan Dini. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4. No. 1 Tahun 2015.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

- Nurlaila. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Permadi, A.D. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Siregar, S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D. Alfabeta. Bandung.
- Suyono. 2018. Analisis Regresi untuk Penelitian. Yogyakarta. Deepublish.
- Tanjung, A.H. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan aplikasi. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Udiyanti, N.L.N.A. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Genesha*, vol. 2. No. 1 tahun 2014.
- Wiiaya., T. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di-

Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana daftar kuesioner terlampir. Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah)”**

Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab kuesioner ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

Hania

A. Data Responden

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

Nama Responden : _____ *)

Usia : ≤ 25 26-30
 31-35 36-40
 ≥41

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Pendidikan Terakhir : D3 S1
 S2 S3

Lama Bekerja : < 1 tahun 1-3 tahun
 4-5 tahun > 5 tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda cek list (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu.

Keterangan:

- SD = Seluruhnya Diterapkan
- SBD = Sebagian Besar Diterapkan
- KKD = Kadang-kadang Diterapkan
- SKD = Sebagian Kecil Diterapkan
- TD = Tidak Diterapkan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Pertanyaan/Pernyataan	SD	SBD	KKD	SKD	TD
		5	4	3	2	1
1	Penerapan basis akrual untuk pengakuan aset dalam Neraca Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					
2	Penerapan basis akrual untuk pengakuan kewajiban dalam Neraca Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					
3	Penerapan basis akrual untuk pengakuan ekuitas dalam Neraca Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					

4	Penerapan basis kas untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kantor bapak/ibu.					
5	Penerapan basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kantor bapak/ibu.					
6	Penerapan basis kas untuk pengakuan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kantor bapak/ibu.					
7	Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					
8	Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					
9	Menyajikan dengan wajar peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya dalam Laporan Keuangan pada bapak/ibu.					
10	Aset dicatat sesuai dengan nilai wajar dalam Laporan Keuangan pada kantor bapak/ibu.					

Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	SD	SBD	KKD	SKD	TD
		5	4	3	2	1
1	Laporan Keuangan mengandung informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian mereka di masa lalu.					
2	Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat membantu					

	pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
3	Laporan keuangan menyajikan informasi yang tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
4	Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
5	Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.					
6	Laporan keuangan dapat diverifikasi.					
7	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.					
8	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
9	Penerapan basis kas untuk pengakuan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada kantor bapak/ibu.					
10	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang dapat dimengerti oleh pengguna atau pihak yang berkepentingan.					

LAMPIRAN 2: Jawaban Kuesioner

RESPONDE N	JAWABAN KUESIONER PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN										JUMLA H
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
2	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	43
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
6	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	47
9	5	5	5	5	5	3	4	3	4	3	42
10	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
11	5	5	5	5	5	4	3	4	3	4	43
12	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
13	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	46
14	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	47
15	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	47
16	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	41
17	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	29
18	2	4	4	4	5	4	4	4	4	4	39
19	5	5	5	5	5	5	4	3	4	3	44
20	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	48
21	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	45
22	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
23	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
24	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	47
25	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
26	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	45
27	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	46
28	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
29	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	44
30	5	4	5	5	4	3	4	3	4	4	41
TOTAL	14 1	14 5	14 1	13 9	14 4	12 7	12 3	12 6	12 5	12 8	1339

RESPONDE N	JAWABAN KUESIONER LAPORAN KEUANGAN										JUMLA H
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
8	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
9	3	3	5	5	5	5	4	5	5	4	44
10	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	42
11	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	41
12	3	5	4	4	4	4	3	4	4	5	40
13	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	39
14	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	38
15	4	4	4	3	3	5	5	3	4	4	39
16	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	36
17	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	38
18	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
19	4	4	5	3	4	5	4	3	4	4	40
20	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
21	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	48
22	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	45
23	5	4	3	5	4	4	4	5	5	5	44
24	5	4	5	3	5	5	4	4	4	4	43
25	4	4	5	5	5	5	3	4	5	3	43
26	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	41
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
29	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
30	3	3	5	5	5	5	4	5	5	4	44
TOTAL	12 5	12 5	13 0	12 6	13 0	13 3	12 6	12 8	12 9	12 5	1277

LAMPIRAN 3 : Karakteristik Responden

jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pria	16	53.3	53.3	53.3
	wanita	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 25	2	6.7	6.7	6.7
	26-30	3	10.0	10.0	16.7
	31-35	7	23.3	23.3	40.0
	36-40	8	26.7	26.7	66.7
	≥ 41	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	3	10.0	10.0	10.0
	S1	19	63.3	63.3	73.3
	S2	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

lama kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 tahun	1	3.3	3.3	3.3
	2-3	4	13.3	13.3	16.7
	4-5	5	16.7	16.7	33.3
	>5 tahun	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X7	Pearson Correlation	.154	.308	.166	.178	.223	.276	1	.350	.853**	.322	.576**
	Sig. (2-tailed)	.418	.098	.382	.346	.236	.140		.058	.000	.082	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X8	Pearson Correlation	.261	.523**	.208	.159	.261	.754**	.350	1	.345	.874**	.730**
	Sig. (2-tailed)	.163	.003	.271	.402	.164	.000	.058		.062	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X9	Pearson Correlation	.176	.303	.189	.209	.243	.206	.853**	.345	1	.511**	.614**
	Sig. (2-tailed)	.353	.103	.316	.268	.197	.275	.000	.062		.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X10	Pearson Correlation	.292	.438*	.243	.205	.183	.627**	.322	.874**	.511**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.117	.015	.195	.278	.332	.000	.082	.000	.004		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.644**	.848**	.670**	.680**	.515**	.677**	.576**	.730**	.614**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (y)

X1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	3.00	1	3.3	3.3	6.7
	4.00	4	13.3	13.3	20.0
	5.00	24	80.0	80.0	100.0
Total		30	100.0	100.0	

X2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	3	10.0	10.0	13.3
	5.00	26	86.7	86.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

X3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	6	20.0	20.0	23.3
	5.00	23	76.7	76.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

X4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	8	26.7	26.7	30.0
	5.00	21	70.0	70.0	100.0
Total		30	100.0	100.0	

X5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	6	20.0	20.0	20.0
	5.00	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	15	50.0	50.0	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	19	63.3	63.3	76.7
	5.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	14	46.7	46.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	15	50.0	50.0	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	12	40.0	40.0	56.7
	5.00	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Variable Kualitas laporan keuangan (y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	TOTAL
Y1	Pearson Correlation	1	.622**	.323	.138	.190	.246	.552**	.360	.207	.294	.623**
	Sig. (2-tailed)		.000	.081	.467	.315	.190	.002	.051	.272	.115	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.622**	1	.349	.149	.117	.172	.373*	.305	.223	.546**	.609**
	Sig. (2-tailed)	.000		.059	.432	.538	.364	.043	.101	.236	.002	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.323	.349	1	.219	.574**	.612**	.292	.435*	.525**	.174	.686**
	Sig. (2-tailed)	.081	.059		.245	.001	.000	.117	.016	.003	.357	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.138	.149	.219	1	.637**	.119	.257	.634**	.502**	.276	.615**
	Sig. (2-tailed)	.467	.432	.245		.000	.531	.171	.000	.005	.139	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.190	.117	.574**	.637**	1	.067	.239	.474**	.382*	.108	.586**
	Sig. (2-tailed)	.315	.538	.001	.000		.726	.204	.008	.037	.568	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y6	Pearson Correlation	.246	.172	.612**	.119	.067	1	.289	.240	.519**	.159	.514**
	Sig. (2-tailed)	.190	.364	.000	.531	.726		.122	.201	.003	.401	.004
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y7	Pearson Correlation	.552**	.373*	.292	.257	.239	.289	1	.407*	.340	.276	.638**

	Sig. (2-tailed)	.002	.043	.117	.171	.204	.122		.025	.066	.139	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y8	Pearson Correlation	.360	.305	.435*	.634**	.474**	.240	.407*	1	.778**	.514**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.051	.101	.016	.000	.008	.201	.025		.000	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y9	Pearson Correlation	.207	.223	.525**	.502**	.382*	.519**	.340	.778**	1	.455*	.755**
	Sig. (2-tailed)	.272	.236	.003	.005	.037	.003	.066	.000		.011	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Y10	Pearson Correlation	.294	.546**	.174	.276	.108	.159	.276	.514**	.455*	1	.600**
	Sig. (2-tailed)	.115	.002	.357	.139	.568	.401	.139	.004	.011		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.623**	.609**	.686**	.615**	.586**	.514**	.638**	.800**	.755**	.600**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.004	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Frekuensi Kualitas laporan Keuangan (y)

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	15	50.0	50.0	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	13.3	13.3	13.3
	4.00	17	56.7	56.7	70.0
	5.00	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	14	46.7	46.7	56.7
	5.00	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	14	46.7	46.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	16	53.3	53.3	60.0
	5.00	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	15	50.0	50.0	53.3
	5.00	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	14	46.7	46.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	3	10.0	10.0	10.0
	4.00	16	53.3	53.3	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	6.7	6.7	6.7
	4.00	17	56.7	56.7	63.3
	5.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	5	16.7	16.7	16.7
	4.00	15	50.0	50.0	66.7
	5.00	10	33.3	33.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

LAMPIRAN 5: Uji Reliability**Scale :Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Cronbach's Alpha	.857	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	39.9333	14.685	.531	.726	.847
X2	39.8000	14.924	.813	.872	.831
X3	39.9333	14.754	.571	.797	.843
X4	40.0000	14.621	.580	.833	.843
X5	39.8333	16.420	.439	.732	.854
X6	40.4000	14.593	.574	.696	.843
X7	40.5333	15.430	.468	.884	.852
X8	40.4333	14.116	.635	.924	.837
X9	40.4667	14.878	.495	.914	.851
X10	40.3667	13.964	.637	.929	.837

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
44.6333	18.033	4.24657	10

Scale: Kualitas laporan keuangan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.841	.842	10

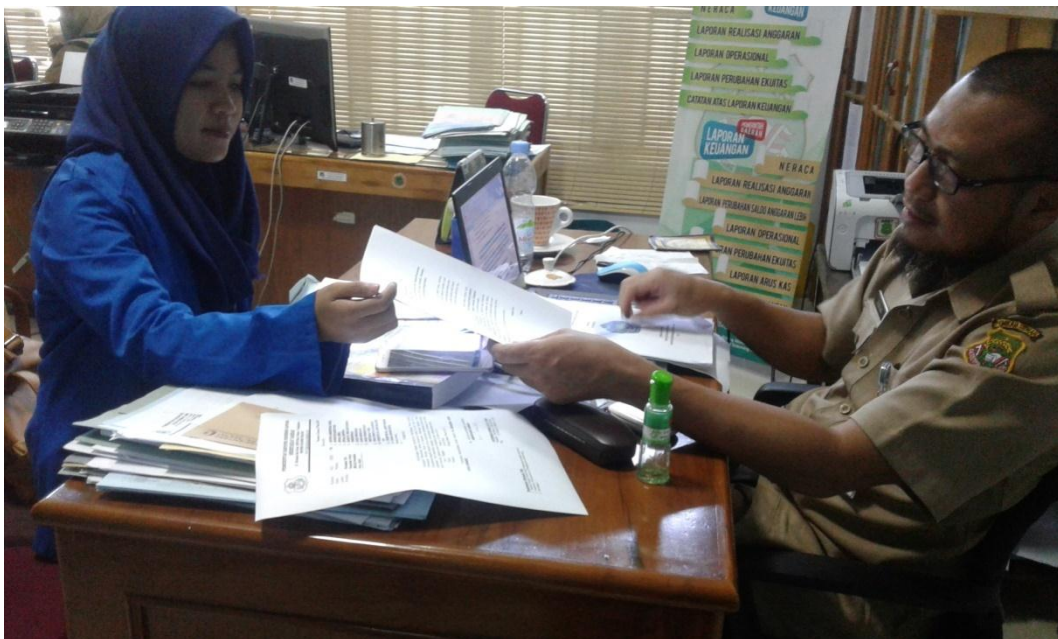
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	38.4000	14.524	.505	.579	.829
Y2	38.4000	14.800	.498	.632	.829
Y3	38.2333	14.323	.588	.808	.821
Y4	38.3667	14.516	.492	.706	.831
Y5	38.2333	15.082	.478	.771	.831
Y6	38.1333	15.568	.404	.700	.837
Y7	38.3667	14.378	.519	.381	.828
Y8	38.3000	13.803	.734	.790	.807
Y9	38.2667	14.271	.683	.750	.813
Y10	38.4000	14.662	.477	.508	.832

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
42.5667	17.702	4.20741	10

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi







RIWAYAT PENULIS



Hania, adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan ayahanda Baharuddin dan ibunda Nurhayati sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1996. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 8 Batu Desa Leppangeng (*lulus tahun 2008*), Melanjutkan ke SMP Bungaya Makassar (*lulus tahun 2011*), dan Melanjutkan ke SMAN 14 Makassar (*lulus tahun 2014*), Kemudian melanjutkan pendidikan setara satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan akhirnya lulus pada tahun 2018.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengaruh Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap”**.